

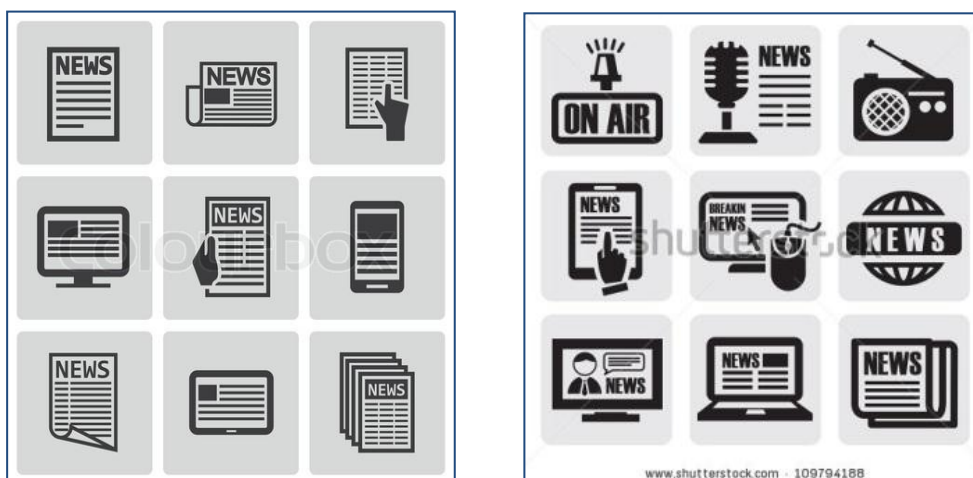


**Kementerian PPN/
Bappenas**

e-Newspaper Media Online

Sarana & Prasarana

Senin, 1 September 2014



**Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan
Jakarta, Bappenas
2014**

Daftar Isi

1. REVITALISASI PERAN POSYANDU (*Media Online Kompas*)
2. PEMERINTAH AKAN BANGUN JALAN KA SELURUH SUMATERA (*Media Online Indonesia Finance Today*)

Revitalisasi Peran Posyandu

Aspek Perkembangan Anak Belum Diperhatikan

JAKARTA, KOMPAS — Program pos pelayanan terpadu sebatas memperhatikan aspek pertumbuhan anak, sedangkan aspek perkembangan anak belum diperhatikan. Padahal, pertumbuhan harus disertai perkembangan yang baik untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas di masa depan.

Untuk itu, fungsi penyuluhan posyandu perlu diperkuat. Demikian disampaikan ahli gizi pada Departemen Gizi Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, Ali Khom-san, di sela Peluncuran Toolkit bagi Kader Posyandu Peduli TAT (Tumbuh Aktif Tanggap), Sabtu (30/8), di Jakarta.

"Posyandu hanya populer sebagai tempat penimbangan berat badan serta vaksinasi dan imunisasi anak. Padahal, anak tak cukup berbadan tinggi dan sehat, tetapi juga harus mampu berpikir, beraktivitas fisik, dan berinteraksi dengan lingkungan secara baik," kata Ali.

Menurut Ali, keterlambatan memperhatikan tumbuh kembang anak, terutama dalam seribu hari pertama kehidupan, akan menurunkan kecerdasan dan keterampilan anak pada periode kehidupan selanjutnya.

Dampak lebih luas adalah Indonesia kian sulit memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) berkualitas di masa depan. Tahun 2013, peringkat indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia masih sama dengan 2012, yakni posisi ke-108 dari 287 negara, dan masuk kelompok pembangunan manusia sedang (*Kompas*, 25/7).

Sejauh ini, fungsi penyuluhan posyandu lemah, ditandai penurunan kunjungan anak usia di atas 3 tahun. Dalam studi penerapan pelaksanaan Posyandu Peduli TAT Agustus 2013-Feb-

“
Anak tak cukup berbadan tinggi dan sehat, tetapi juga harus mampu berpikir, beraktivitas fisik, dan berinteraksi dengan lingkungan secara baik.

ruari 2014, Ali menemukan kunjungan anak usia 0-12 bulan ke Posyandu Peduli TAT 31,4 persen, kunjungan anak usia 13-24 bulan naik jadi 43,6 persen, lalu turun pada usia 25-36 bulan.

Kunjungan turun

Menginjak usia di atas 3 tahun, kunjungan anak usia 37-48 bulan turun drastis jadi hanya 4,6 persen, lalu turun lagi jadi 1,6 persen di usia 49-60 bulan. "Orang tua menganggap pergi ke posyandu hanya penting sampai imunisasi dan vaksinasi anak selesai di usia 3 tahun. Padahal, tumbuh kembang anak harus dilihat hingga usia 5 tahun," kata Ali.

Karena itu, peran posyandu dalam meningkatkan kesehatan keluarga perlu direvitalisasi, salah satunya lewat program Posyandu Peduli TAT. Dalam prog-

ram itu, para kader posyandu didorong meningkatkan fungsi penyuluhan, tak hanya untuk aspek pertumbuhan, tetapi juga perkembangan anak. "Revitalisasi bukan berarti sekadar menambah dana, melainkan juga melatih para kader agar memiliki pengetahuan cukup," ujar Ali.

Ketua IV Tim Penggerak Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Pusat, Soesilawati Soebekti, mengatakan, jumlah kunjungan ke posyandu naik setelah masuk program Posyandu Peduli TAT. Dalam studi yang dilakukan Ali, 6 provinsi mencatat peningkatan kunjungan anak di bawah usia 3 tahun ke Posyandu Peduli TAT hingga lebih dari 40 persen. Peningkatan tertinggi ada di Sumatera Utara, yakni 87,5 persen.

"Sebelum jadi Posyandu Peduli TAT, kunjungan rendah karena kegiatan hanya berupa penimbangan serta imunisasi," kata Soesilawati. Setelah menerapkan pemantauan tumbuh-aktif-tanggap, kunjungan meningkat karena orang tua memperoleh tambahan pengetahuan terkait aspek perkembangan anak.

Vita (37), kader posyandu asal Kupang, Nusa Tenggara Timur, menuturkan, tantangan terbesar yang dihadapi adalah saat berkunjung ke rumah keluarga yang tak membawa anak balitanya pada hari pelaksanaan posyandu. "Saya sempat dimarahi karena dianggap mengganggu," ujarnya.

Ali mengatakan, program Posyandu Peduli TAT juga bertujuan mendorong pemerintah daerah agar menjalankan program serupa. "Cakupan program itu baru sekitar 4.900 posyandu, sedangkan secara nasional ada lebih dari 330.000 posyandu. Sebagai penentu anggaran kegiatan posyandu, pemda harus memiliki peran utama," ujarnya. (A03)

Program pos pelayanan terpadu sebatas memperhatikan aspek pertumbuhan anak, sedangkan aspek perkembangan anak belum diperhatikan. Padahal, pertumbuhan harus disertai perkembangan yang baik untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas di masa depan

Hashtag Berita :

#PelayananTerpadu #Infrastruktur

PEMERINTAH AKAN BANGUN JALAN KA SELURUH SUMATERA



DECIDE NOW

subscribe dan download aplikasi Android & iOS
di : www.ifl.co.id

Untuk berlangganan
koran Indonesia Finance Today
hubungi 021-700 95499



INDONESIA FINANCE TODAY

DECIDE NOW

Senin, 1 September 2014Halaman 6 Kolom 1-4

Pemerintah akan Bangun Jalan KA Seluruh Sumatera

Dusep Malik

PADANG - Pemerintah kembali memunculkan ide pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan seluruh provinsi di Sumatera. Chairul Tanjung, Menteri Koordinator Perekonomian, mengatakan pembangunan jalur kereta tersebut akan berdampingan dengan jalur tol trans Sumatera.

Menurut Chairul, ide pembangunan jalur kereta api di samping jalan tol trans Sumatera berawal dari maraknya penggunaan kereta angkutan barang untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan jalur kereta api ini dinilai tidak membutuhkan lahan yang luas, karena hanya menyisihkan sebagian lahan di sisi tol trans Sumatera.

"Kesepakatan dengan para Gubernur se-Sumatera itu kita putus untuk bangun jalur kereta api di samping tol trans Sumatera yang akan kita buat. Tanahnya itu nanti akan disisihkan sebagian disesuaikan dengan kebutuhan jalur kereta api. Kepastian ini masih akan dibahas lanjutannya di tingkat teknis," terangnya.

Chairul menuturkan, atas kesepakatan ini maka para Gubernur diharapkan dapat segera mempercepat pengadaan lahannya, khususnya pada empat proyek utama pembangunan jalur tol trans Sumatera yang akan di *groundbreaking* awal Oktober 2014.

Adapun sumber pembiayaan



Pemerintah berencana membangun jalan kereta lintas Sumatera.

untuk jalur kereta api ini diakui masih dikaji tim. Sementara untuk pengadaan lahannya diharapkan bisa dilakukan dalam satu paket dengan pengadaan lahan untuk jalur tol trans Sumatera. "Ini masih kita sesuaikan, nanti ada eselon I dan lainnya membahas," jelasnya.

Sementara itu, empat ruas tol trans Sumatera yang akan dibangun yang hanya membutuhkan sedikit lahan untuk jalur kereta api adalah ruas Bakauheni-Bandar Lampung, ruas Palembang-Indralaya, ruas Pekanbaru-Kandis-Dumai dan ruas Medan-Kualamu-Tebing Tinggi.

EE. Mangindaan, Menteri Perhubungan, mengatakan pembangunan jalur kereta api yang berdampingan dengan jalur tol trans Sumatera adalah tambahan jalur kereta api yang diinginkan untuk menghubungkan Bandar Lampung hingga Nangroe Aceh Darussalam. Sebab, selama ini pembangunan jalur kereta api sulit dilakukan karena persoalan lahan.

Menurut dia, ide jalan kereta api berdampingan dengan jalan tol trans Sumatera sangat baik dan mengurangi biaya pengadaan lahan. Nantinya, jalur akan dibangun dengan *single truck* dan *double truck* di daerah tertentu untuk mengurangi kepadatan. Diharapkan ide ini dapat dicanangkan bersama dengan empat ruas tol trans Sumatera pada Oktober 2014.

Mangindaan menuturkan, pembangunan jalur kereta api ini nantinya akan dikerjakan bersama antara pemerintah dan investor, dimana pengadaan lahan dilakukan oleh pemerintah dan retnya akan diserahkan swasta dengan pola Public Private Partnership (PPP).

"Atas putusan ini pemerintah pusat mengharapkan para gubernur di setiap provinsi yang dilintasi tol trans Sumatera segera menyiapkan lahannya, dan untuk tahap pertama diharapkan ide pembangunan jalur kereta api Sumatera ini bisa bersamaan dengan *groundbreaking* empat ruas tol trans Sumatera," tegasnya.

Perlu Kajian

Lucky Eko Wuryanto, Deputy Bidang Infrastruktur Kementerian Koordinator Perekonomian, mengatakan ide pembangunan jalur kereta api berdampingan dengan jalur tol trans Sumatera sebenarnya muncul saat rapat koordinasi dengan para gubernur se-Sumatera, sehingga masih harus digali lebih dalam.

Menurut dia, upaya peletakan batu pertama pembangunan jalur kereta api bersamaan dengan tol trans Sumatera sangat sulit dilakukan, mengingat ide tersebut masih cukup mentah, sehingga peletakan batu pertama proyek tersebut baru bisa dilakukan pada pemerintah yang akan datang.

Perlu diketahui tol Trans Sumatera direncanakan pembangunannya hingga 2025, terdiri atas 23 ruas yang melewati sembilan provinsi sepanjang 2.628 kilometer (km). Dengan rincian, koridor utama sepanjang 1.833 km dan koridor pendukung 770 km serta ruas Batu Ampar-Muka Kuning dan Bandara Hang Nadim sepanjang 25 km. ●

Pemerintah kembali memunculkan ide pembangunan jalur kereta api yang menghubungkan seluruh provinsi di Sumatera. Pembangunan jalur kereta tersebut akan berdampingan dengan jalur trans Sumatera

Hashtag Berita :

#Infrastruktur #PertumbuhanEkonomiNasional #RKP(RencanaKegiatanPemerintah)